



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WALUYO
2. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3. NHK : 108826

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m²/150 m² di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 380 m² di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m²/36 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m²/60 m² di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 360.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1,5 S CV CK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 183.630.712

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.643.630.712

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.643.630.712

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.